

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ketahanan pangan telah menjadi permasalahan dalam kerangka pembangunan pertanian, hal ini ditunjukkan dengan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu poros kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain poros lainnya, yaitu mengembangkan usaha pertanian melalui pembentukan lembaga swasta yang menangani masalah ketahanan pangan yaitu Badan Ketahanan Pangan dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Penting untuk mengatasi masalah ketahanan pangan untuk menstabilkan system. Ketahanan pangan untuk kepentingan lokal, dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis. Ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi pangan akan menjadi permasalahan bangsa karena tidak dapat mengandalkan ketersediaan pangan yang cukup untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat (Saputra, 2022). Salah satu cara untuk melakukan ini status ekonomi rumah tangga dijaga dengan meningkatkan ketahanan pangan dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Strategi ketahanan pangan berfokus pada petani kemampuan mereka dalam menanam dan memanen tanamannya. Namun kondisi pandemi memaksa setiap orang untuk hidup hemat dan memberdayakan diri (Aidha & Harahap, 2021).

Ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang aman, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi penting karena merupakan faktor keberlanjutan hidup yang sudah menjadi hak asasi, dan ketika ketahanan pangan suatu negara terancam, maka kelangsungan hidup suatu bangsa dipertaruhkan. Ketahanan pangan nasional adalah isu strategis bagi Indonesia. Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak lepas dari upaya mengatasi kerawanan pangan karena kerawanan pangan dapat menjadi penyebab tidak stabilnya ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan oleh hambatan kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, atau hambatan sementara

seperti paparan bencana atau bencana alam (Yuniriyanti, Sudarwati, & Nurdewanto, 2020).

Menurut pedas (2018) dalam Pujiastuti dkk., (2021) memaparkan sambung pucuk merupakan gabungan antara batang bawah dengan dengan cara ini keturunan tumbuhan yang berbeda menjadi satu kesatuan, dan penyatuan ini terus tumbuh membentuk tumbuhan baru, dan penyatuan tersebut terjadi karena menyatunya kambium batang bawah dengan kambium batang atas. Pada dasarnya jumlah cangkokan yang dapat kita gunakan tergantung dari jenis tanaman yang akan kita gunakan sebagai media perbanyakan. Sambung pucuk merupakan penyatuan tunas (sebagai calon batang atas) dengan batang bawah sehingga terbentuk tanaman baru yang mampu beradaptasi satu sama lain secara kompleks.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam konteks peningkatan ketahanan pangan di Desa Giriwarno Kabupaten Wonogiri, diversifikasi pangan melalui perbanyakan tanaman alpukat juga menjadi perhatian, seperti yang dibahas dalam penelitian mengenai perbanyakan vegetatif tanaman alpukat. Oleh karena itu, inovasi sambung pucuk alpukat dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan diversifikasi pangan. Tanaman buah alpukat merupakan tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi, pasca panen buah alpukat tidak memerlukan perlakuan khusus seperti buah pada umumnya, cukup menghubungi pembeli sudah bisa bertransaksi. Alpukat “**Pangeran**” dengan buah besar dan mengkilat merupakan varietas terbaik, dengan melakukan sentuhan teknologi yang tepat dengan “**Inovasi Sambung Pucuk Atas atau *Top Working***”, akan menghasilkan produksi buah alpukat besar dengan tempo yang relative singkat. Kita hanya perlu pucuk pohon/enteres indukan alpukat varietas terbaik tersebut untuk di sambung kepohon-pohon alpukat lokal yang sudah tua dan tidak produktif.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui inovasi sambung pucuk alpukat di Desa Giriwarno Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?*

C. Tujuan Penelitian.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan yaitu, untuk memahami upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui inovasi sambung pucuk alpukat di Desa Giriwarno Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman dalam pengambil kebijakan serta peneliti selanjutnya sesuai dengan kepakaran dalam dibidang ini sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

b) Bagi Penulis

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian, sehingga apa yang diteliti dapat memberikan kemanfaatan baik untuk penulis sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Konsep.

Konsep inovasi sambung pucuk atas atau *Top Working* alpukat merujuk pada pengembangan dan penerapan teknik *Top Working* dalam budidaya tanaman alpukat, untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah alpukat. Inovasi *Top Working* alpukat meliputi:

1. Pengembangan teknik *Top Working* yang lebih efektif dan efisien.
2. Pengembangan varietas alpukat yang memiliki kualitas buah yang lebih baik.

Dengan inovasi sambung pucuk atas atau *Top Working* alpukat, dapat diharapkan bahwa produksi dan kualitas buah alpukat akan meningkat, serta dapat membantu dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui inovasi dalam budidaya tanaman.

F. Kajian Teori.

Tanaman buah alpukat sangat bagus ditanam di wilayah Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dengan ketinggian 500 dpl. Pemerintah Desa Giriwarno mengangkat komoditas buah alpukat sebagai salah satu program ketahanan pangan yang menjadi prioritas, melalui Inovasi Sambung Pucuk Atas atau *Top Working* tanaman alpukat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori kebijakan dari Edward III (1980), hal ini berkaitan dengan kebijakan dengan kepala desa Giriwarno yang memberikan kebijakan berupa support dan pemberian fasilitas kepada para petani yang tidak lain adalah warganya sendiri guna mengembangkan dan melancarkan budidaya alpukatnya.

Menurut Tachjan dalam Witri (2022) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program atau kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai tujuan. Menurut Suharto dan Nugroho, kebijakan tersebut tidak ada artinya tidak dilaksanakan. Sebagus apapun integritas suatu kebijakan, jika tidak diimplementasikan secara maksimal maka integritas kebijakan publik akan menjadi wacana yang tidak bermakna. Meskipun implementasi berbeda dengan integritas kebijakan, namun bukan berarti keduanya merupakan keduanya dapat dipisahkan. Langkah integritas kebijakan merupakan langkah teoritis, sedangkan langkah implementasi kebijakan bersifat praktis. Keberhasilan tujuan kebijakan terpadu sangat ditentukan oleh langkah-langkah implementasinya.

Sedangkan menurut Edward (1980) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pengaplikasian pada kebijakan public adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan pengajuan pertanyaan dan prosedur, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, data dianalisis secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam penyelidikan jenis ini mendukung pandangan penelitian yang menghargai metode induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menafsirkan kompleksitas situasi (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konseptual tentang permasalahan yang dihadapi, menjelaskan fakta-fakta yang relevan dengan mengeksplorasi teori-teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2013).

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999)

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Giriwarno Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilih sebagai penelitian lokasi tersebut karena merupakan tempat yang dijadikan sebagai topik utama dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data merupakan suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis, dapat menghasilkan informasi yang beragam. Dengan menggunakan metode tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menggambarkan atau merujuk pada sesuatu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan teknik berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

4. Keabsahan Data.

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, mendeskripsikan data dalam satuan satuan, mensintesis data, menyusun data menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Analisis data sangat penting dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Nasution (1998) menyatakan: “Analisis dimulai setelah perumusan dan klarifikasi masalah, sebelum memasuki lapangan, dan berlanjut hingga hasil penelitian ditulis.

5. Teknik Analisis Data.

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berurutan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles & Huberman (1994) terdapat analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data.

Pada fase ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan (Miles & Huberman, 1994).

b. Reduksi Data.

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yaitu data yang kasar muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data yaitu berlangsung terus- 14

menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 1994).

c. Penyajian Data.

Penyajian data mempunyai arti yaitu sekumpulan rencana informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif (Miles & Huberman, 1994).

d. Penarikan Kesimpulan.

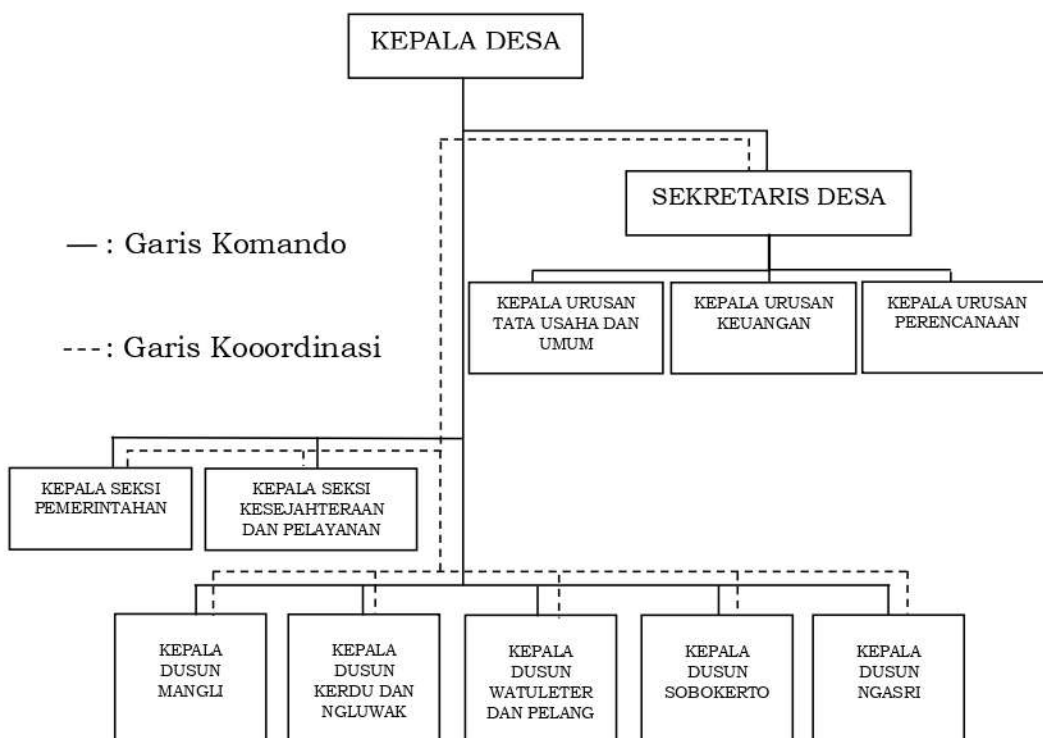
Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dari proses analisa yang memajukan data. Tahap ini berarti penarikan arti data yang dapat dilakukan dalam proses analisa data model interaktif (Miles & Huberman, 1994)

BAB II PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum.

Desa Giriwarno adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bp. Purwanto. Secara geografis terletak di daerah pegunungan, Desa Giriwarno di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatirejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selorejo sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sanan. Desa Giriwarno meliputi 7 (tujuh) Dusun yang terdiri dari: Dusun Mangli, Pelang, Kerdu, Watuleter, Sobokerto, Ngasri dan Ngluwak. Desa Giriwarno terdiri dari 17 (tujuh belas) RT dan 8 (delapan) RW.

Gambar 1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Giriwarno
Kecamatan Girimarto



Tanaman buah alpukat sangat bagus ditanam di wilayah Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dengan ketinggian 500 dpl. Pemerintah

Desa Giriwarno mengangkat komoditas buah alpukat sebagai salah satu program ketahanan pangan yang menjadi prioritas.

B. Pembahasan.

Pemerintah Desa Giriwarno mengangkat komoditas buah alpukat sebagai salah satu program ketahanan pangan yang menjadi prioritas. Tanaman lokal buah alpukat di desa ini cukup banyak tetapi kualitas buahnya rata-rata kurang baik. Dengan perencanaan yang matang, berawal dari musyawarah desa membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), diteruskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah mengalokasikan anggaran untuk budidaya alpukat.

Proses budidaya alpukat dimulai dengan pendataan pohon alpukat, pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa, Pembentukan Kelompok Tani dan kerjasama dengan Pusat Pembibitan Alpukat (Pusbikat) Bandungan, Semarang.

Top Working dilakukan setelah dahan-dahan pohon alpukat dipangkas dan tumbuh tunas baru, lalu disambung dengan pucuk/enteres varitas unggul oleh teknisi dari Pusbikat. Sekaligus praktek bimbingan teknis dilapangan dengan Kelompok Tani. Dalam kondisi baik *Top Working* dalam tempo satu tahun sudah berbuah lebat. Selain *Top Working* juga dilakukan bimbingan teknis cara membuat stek bibit unggul dari biji/sedling, pemeliharaan, pengendalian hama, pengelolaan hasil inovasi dan pemasaran.

Melihat potensi dan nilai ekonomis yang tinggi pada tanaman alpukat, Pemerintah Desa Giriwarno mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan merupakan hal yang sangat tepat. Alpukat varietas “Pangeran” dengan buah yang besar dan mengkilat, dengan berat rata-rata 1-1,6 kg per buah, dengan produksi yang tinggi setahun bisa tiga kali panen, akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan petani dan warga desa.

Ditahun 2022 Kelompok Tani Alpukat sudah bisa menikmati hasil budidaya tersebut, di pohon milik Bp. Supriyanto di Dusun Mangli RT 001/001 Desa Giriwarno sudah panen yang ketiga, sekali panen laku Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per pohon. Dengan adanya “Inovasi Sambung Pucuk Alpukat

Atas atau *Top Working*” diharapkan perekonomian desa lebih maju, mandiri dan berdaya saing, menjadi desa sentra budidaya alpukat.

Inovasi Sambung Pucuk Alpukat Atas atau *Top Working* di Desa Giriwarno dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun, dengan perencanaan sebagai berikut :

1. Tahun pertama (2018) :
 - Membentuk Tim/Pos Pelayanan Teknologi Desa
 - Identifikasi dan mendata pohon alpukat.
 - Study Banding ke Pusat Pembibitan Alpukat.
 - Membentuk Kelompok Tani Alpukat tingkat Desa.

1. Tahun kedua (2019) :
 - Bimbingan dan Pelatihan Inovasi Sambung Pucuk Atas (*Top Working*) oleh rekanan/Pusat Pembibitan Alpukat.
 - Pembuatan demplot dan pembelian bibit unggul.

2. Tahun ketiga (2020) :
 - Evaluasi dan intensifikasi kegiatan kelompok.
 - Pembuatan bibit alpukat secara mandiri.
 - Inovasi Sambung Pucuk Atas (*Top Working*) secara mandiri.

3. Tahun keempat (2021) :
 - Perawatan dan pengendalian hama pohon alpukat.
 - Peningkatan SDM Kelompok Tani Alpukat.

4. Tahun kelima (2022) :
 - Pengelolaan hasil inovasi dan pemasaran.
 - Promosi dan pengembangan usaha kelompok.

Gambar 2 : Model HKI Poster Inovasi Sambung Pucuk Alpukat.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Inovasi Sambung Pucuk atau *Top Working* alpukat antara lain :

1. Inovasi sambung pucuk atau *Top Working* alpukat telah diakui sebagai langkah kreatif dalam budidaya tanaman alpukat.
2. Teknik sambung pucuk atau *Top Working* alpukat mendorong masyarakat untuk semakin membudidayakan alpukat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan produksi dan kualitas buah alpukat.
3. Penggunaan teknik sambung pucuk atau *Top Working* pada tanaman alpukat merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas buah alpukat, sehingga memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat.
4. Kegiatan penyuluhan teknik sambung pucuk atau *Top Working* tanaman alpukat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui budidaya yang tepat, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dalam menerapkan inovasi teknologi.

Dengan demikian, Inovasi Sambung Pucuk atau *Top Working* alpukat memiliki potensi besar dalam meningkatkan produksi, kualitas buah, dan pendapatan petani, serta berperan penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi tanaman dan inovasi dalam budidaya.

B. Saran.

Pemerintah desa selaku pihak pemegang kebijakan ditingkat bawah, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan hendaklah senantiasa memberikan dukungan, pelayanan, pembelajaran dan sosialisasi yang massif pada masyarakat. Supaya masyarakat mempunyai keterampilan serta pemahaman tentang pentingnya teknologi yang tepat guna dalam upaya meningkatkan hasil pertanian atau Perkebunan.